

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan pondasi yang tidak bisa tergantikan bagi kehidupan dan peradaban manusia. Dalam pendidikan terdapat banyak aspek penting untuk pengembangan individu serta pemenuhan potensi yang dimana menggerakkan perubahan sosial sehingga dapat menghasilkan banyak inovasi dan kemajuan. Pemerintah yang berperan sebagai pemegang sistem sudah seharusnya dapat memberikan kesamarataan pendidikan yang efektif bagi setiap warga negara. Sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.<sup>6</sup> Pendidikan yang merata dalam memberikan layanan dan kemudahan disini dapat juga dikaitkan kepada mereka yang masih mendapatkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan di sekolah yaitu anak berkebutuhan khusus.

Terdapat jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang bentuknya sudah berkembang mulai dari pendidikan segregatif yang familiar dikenal dengan bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) ataupun Sekolah Khusus (SKH) dan pendidikan integrasi/inklusif. Dalam pendidikan inklusif dirancang untuk memberikan ruang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan anak-anak lainnya di sekolah reguler. Sekolah inklusif merupakan model pendidikan yang berkembang dengan tujuan untuk menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan khusus peserta didik, sehingga mereka tetap dapat menikmati hak-hak dasar dalam bidang pendidikan secara setara.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Maret 2025 sudah meluncurkan program Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif dalam bentuk Modul Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar guna meningkatkan kompetensi guru

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat 1

dalam memenuhi hak para peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif dan setara. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril mengingatkan kembali komitmen pemerintah dalam memberikan pembelajaran secara setara dan bersama-sama kepada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Saat ini ada sekitar 40 ribu sekolah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPPI) yang merupakan penugasan wajib kepada setiap kabupaten/kota untuk menyediakan seminimnya satu sekolah dengan layanan pendidikan inklusif<sup>7</sup>. Dengan jumlah yang demikian, kesempatan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusif dan setara secara bersama-sama semakin terbuka luas karena tidak lagi terbatas pada kuota murid

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang sendiri sebagai suatu dukungan penuh terkait pelaksanaan pendidikan inklusif mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 800/Kep. 0265-Dispendik/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022. Telah disebutkan juga dalam penerimaan peserta didik ABK penerimaannya dikelompokkan pada jalur afirmasi sebanyak 2,5% dari jumlah peserta didik yang diterima pada sekolah yang ditunjuk.

Kriteria Pelaksanaan Pendidikan Inklusif pada Jenjang SMPN di Kota Tangerang juga dijelaskan yaitu; (1) Sekolah penerima siswa ABK/PDB (Peserta Didik Berkelainan) adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. (2) Sekolah memiliki minimal 1 siswa ABK/PDB. (3) Sekolah memiliki GPK (Guru Pembimbing Khusus) paling banyak 2 orang. (4) Sekolah yang tidak memiliki GPK (Guru Pembimbing Khusus) dan berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa, atau Guru yang pernah mengikti

---

<sup>7</sup> Hana Kinarina, "Kemendikbud luncurkan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif," *Antara*, Maret 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4021422/kemendikbud-luncurkan-pendidikan-berjenjang-pendidikan-inklusif>.

pelatihan khusus, atau dapat bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Khusus penyelenggara Pendidikan Luar Biasa di kota Tangerang atau Perguruan Tinggi di kota terdekat.

Pemerintah Kota Tangerang sendiri juga sudah memilih setiap SMPN di 13 kecamatan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan menunjuk salah satu SMPN sebagai Pusat Sumber Belajar Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang. Pusat Sumber Belajar berperan sebagai inisiator aktif dalam pengembangan layanan, sumber dukungan pembelajaran di sekolah inklusif, serta pusat informasi bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pusat ini juga berfungsi sebagai rumah belajar bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tempat berkumpulnya guru sekolah khusus, serta menjadi koordinator layanan seperti terapi, intervensi, konsultasi, dan evaluasi, sekaligus menjembatani kerja sama antara sekolah dan mitra terkait.<sup>8</sup>

Pada pelaksanaan pendidikan sendiri terdapat enam komponen penting agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana yaitu terdapatnya peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran serta peran guru dalam pendidikan itu sendiri.<sup>9</sup> Sehingga dalam implementasi pendidikan inklusif, guru sebagai tenaga pendidik yang terlibat langsung memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan proses tersebut.

Peranan guru dalam pendidikan inklusif harus memiliki kompetensi atau kemampuan mengelola pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kompetensi yang harus dimiliki terdiri atas aspek pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, minat, dan sikap.<sup>10</sup> Pengetahuan (*knowledge*) dan pemahaman (*understanding*) guru dalam pendidikan

---

<sup>8</sup> Wiwi Purnama Dewi, Sudadio, dan Fadlullah, "Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang," *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 643–50. h. 646

<sup>9</sup> Najwa Nurfitri Syawal, Sabrina Subandi, dan Rini Kurnia Tambunan, "Komponen Pendidikan Utama Yang Harus Di Ketahui Di Jenjang Sekolah Dasar," *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (2025): 516–24. h. 521

<sup>10</sup> Nurul Ani Khayati dkk., "Peranan Guru Dalam Pendidikan Inklusif Untuk Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 5561.



inklusif mengacu bagaimana guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar dan melaksanakan pembelajaran secara efektif kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan dalam kemampuan (*skill*) merupakan sesuatu yang dimiliki guru untuk bagaimana memodifikasi kurikulum, memilih metode yang tepat dan menggunakan alat peraga untuk memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus. Nilai (*value*) yaitu bagaimana standar perilaku yang diyakini oleh seseorang seperti perilaku jujur dan terbuka. Sedangkan Sikap (*attitude*) merupakan perasaan (senang/tidak senang) atau reaksi terhadap pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus serta Minat (*interest*) merupakan kecenderungan guru untuk mempelajari peserta didik berkebutuhan khusus. Komponen di atas menjadi penting sebagai seperangkat tindakan yang cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki guru sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas guru.

Sebagai pelaksana utama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif, guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Guru juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi peserta didik non-ABK, agar mereka mampu menerima dan menghargai keberagaman, serta mengembangkan sikap toleransi terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Dengan demikian, peserta didik non-ABK akan belajar untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan, serta menerima keberagaman yang ada di lingkungan sekolah inklusif.

Guru kelas yang terlibat langsung adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini ialah sikap guru. Sebagaimana pendapat Hecht (2017) dalam Ginevra dkk. sikap guru terhadap peserta didik anak berkebutuhan khusus sebagai komponen yang menentukan dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus.<sup>11</sup> Dengan begitu sikap guru yang terbuka dan tidak diskriminatif sangat penting dimiliki sehingga

---

<sup>11</sup> Maria Christina Ginevra dkk., "Teachers' attitudes towards students with disabilities: the role of the type of information provided in the students' profiles of children with disabilities," *European Journal of Special Needs Education* 37, no. 3 (2022): 357–70.

dapat membantu peserta didik ABK menjadi lebih percaya diri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuga menunjukkan apabila sikap guru yang mendorong partisipasi aktif bagi peserta didik ABK juga memberikan dampak positif kepada peserta didik sehingga dapat menunjukkan potensi yang ada pada peserta didik kepada lingkungannya. Ditemukan dengan guru kelas yang menemukan potensi ABK dalam pelajaran olahraga, guru dengan sabar mencoba meminta ABK tersebut untuk ikut bermain sepak bola bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar peserta didik ABK mampu mengembangkan potensinya dan melatih untuk bersosialisasi dengan lingkungan.<sup>12</sup>

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di salah satu SMP Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Tangerang, guru kelas yang mengajar masih ditemui tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik ABK. Hasil wawancara kepada guru pendamping khusus terkait guru kelas yang mengajar ditemukan tidak semua guru kelas menunjukkan sikap baik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, ada guru yang bersikap baik hanya ketika Guru Pendamping Khusus sedang berada di kelas mendampingi peserta didik ABK, tetapi tidak memberikan akomodasi dalam pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya ketika tidak bersama Guru Pembimbing Khususnya. Selain itu berdasarkan hasil observasi ke dalam ruang-ruang kelas masih ditemukan guru kelas yang belum mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, dengan penempatan tempat duduk yang masih acak dan cenderung berada di barisan belakang di tiap kelasnya sehingga sulit dijangkau ketika pembelajaran. Penempatan tempat duduk bagi peserta didik ABK juga merupakan bentuk akomodasi yang bisa dilakukan guru. Namun faktanya, masih banyak ditemui guru yang abai dalam mengakomodasi anak berkebutuhan khusus di kelas.

---

<sup>12</sup>Yuga Fibra Nurhakim dan Yayang Furi Furnamasari, "Sikap Guru Dalam Menghadapi Siswa Yang Berkebutuhan Khusus DI Kelas 2 SDN Jelegong 01 Rancaekek," Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan 1, no. 3 (Juli 2023): 155–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1814>. h. 166

Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan masih adanya guru yang menunjukkan sikap kurang responsif terhadap keberadaan peserta didik ABK, khususnya dalam pembelajaran olahraga. Salah satu temuan mencolok adalah sikap guru yang terkesan cuek, di mana peserta didik ABK dibiarkan tidak terlibat dalam kegiatan pelajaran dengan hanya duduk menunggu di ruang kelas atau sekadar menonton teman-temannya berkegiatan olahraga dari pinggir lapangan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya upaya guru untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik ABK dalam pembelajaran.

Observasi di sekolah lainnya pada SMP Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Tangerang sudah ditemukan adanya ruang inklusi untuk menunjang pembelajaran bagi peserta didik ABK. Ruang sumber atau ruang inklusi yang lebih familiar oleh guru di sekolah ini menjadi tempat di mana peserta didik ABK mendapatkan pelayanan berdasarkan kebutuhannya. Ruang sumber menyediakan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan bagi peserta didik ABK yang terdaftar di sekolah tersebut. Seperti yang ada saat observasi yaitu peralatan yang sudah sangat memadai bagi peserta didik hambatan penglihatan, yaitu alat cetak braille, *long cane* untuk orientasi mobilitas, serta media baca yang menggunakan cetak braille maupun dengan ukuran font yang diperbesar untuk hambatan penglihatan rendah (*low vision*). Namun fakta menarik ditemukan melalui pengakuan Guru Pembimbing Khusus di sekolah tersebut, di mana peserta didik ABK diminta untuk ke ruang sumber atau ruang inklusi di mata pelajaran IPA, Matematika bagi kelas tinggi, olahraga, PPKn dan lainnya dengan arahan langsung dari guru yang diampu. Pada hal ini menunjukkan sikap guru yang mengajar di kelas dalam mata pelajaran tersebut belum bersikap baik dalam menerima hadirnya peserta didik ABK untuk belajar bersama di ruang kelas dalam mata pelajaran yang diampunya.

Selain itu dalam mata pelajaran IPA ditemukan dari bagaimana guru yang menyampaikan pembelajaran dengan minimnya penggunaan media pembelajaran alternatif yang dapat diakomodasi oleh salah satu PDBK



tunanetra dalam kelas. Guru menyampaikan media hanya dengan visual saja di mana hal ini merupakan keterbatasan bagi individu tunanetra. Sikap ini kurang tepat dikarenakan terbatasnya pengetahuan akan siapa individu berkebutuhan khusus itu sendiri. Guru pun juga tidak melakukan penyesuaian terkait bentuk-bentuk soal yang dibuat sebagai evaluasi dalam pembelajaran, karena media pembelajaran yang hanya menggunakan visual dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa guru kurang perhatian dalam mengakomodasi peserta didik ABK di kelas pada aspek penempatan tempat duduk ABK, hal ini disebabkan karena masih kurang pengetahuan guru terkait Anak Berkebutuhan Khusus itu sendiri. Di sisi lain, ditemukan perhatian guru yang agak berbeda ketika ada guru GPK di kelas dan saat tidak ada, misalnya ketika ada GPK guru mata pelajaran cenderung perhatian menanyakan kinerja ABK tetapi ketika guru GPK meninggalkan kelas, guru mata pelajaran mengabaikan peserta didik kembali. Penemuan guru yang tidak konsisten menghadapi kehadiran Anak Berkebutuhan Khusus jika tidak bersama Guru Pembimbing Khususnya, menunjukkan bahwa guru masih belum memahami ABK yang didasari dengan emosional atau perasaan sehingga dapat tergerak langsung dalam menangani ABK secara utuh. Sehingga dalam kecenderungan berperilaku seperti apa yang dilakukan guru mata pelajaran olahraga yang membiarkan peserta didik ABK tidak berpartisipasi saat pelajaran menunjukkan bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap peserta didik ABK dalam mengikuti pelajaran. Kondisi ini menjadi menarik untuk diketahui bagaimana pengetahuan, perasaan, serta kecenderungan perilaku yang merupakan struktur sikap yang dapat dinilai dan diukur kepada guru terhadap peserta didik ABK di sekolah dan kelas yang mereka ajar.

Sikap positif guru terhadap keberadaan peserta didik ABK di kelas yang mereka ajar seharusnya dapat ditunjukkan, dengan pengakuan bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan unik. Pengetahuan akan peserta didik ABK tidak sertamerta akan menghasilkan sikap positif pada

guru dan tenaga pendidik. Seperti penelitian yang dilakukan Mariyana dkk, menunjukkan guru dan tenaga pendidik di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara mempunyai pemahaman yang baik namun tidak terimplementasi baik pada emosi dan perilaku terhadap peserta didik ABK.<sup>13</sup>

Selanjutnya juga dari Udhiyanasari bahwa sikap guru yang kurang baik terhadap peserta didik ABK di sekolah inklusi daerah Jember masih ditemukan. Hasil ini terlihat dari bagaimana guru dalam memperlakukan peserta didik ABK saat proses pembelajaran dengan kurang tepat seperti contoh membiarkan, memarahi, atau sampai main tangan.<sup>14</sup>

Penemuan Nandya dkk terkait sikap guru IPA terhadap peserta didik berkebutuhan khusus pada wilayah Banjarnegara sudah menunjukkan sikap yang cukup baik, namun meski secara mayoritas guru menyatakan bahwa penting bagi setiap peserta didik untuk dididik sesuai dengan tingkat perkembangannya dan sesuai dengan kebutuhannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada anggapan yang kurang baik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>15</sup>

Meskipun pendidikan inklusif telah menunjukkan perkembangan yang pesat, tidak serta merta menjamin akan sikap guru sebagai tenaga pendidik maupun lingkungan sekolah dapat menunjukkan sikap positif seperti penemuan Qonita di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitiannya yang menunjukkan sebagian besar warga sekolah di DKI Jakarta belum menunjukkan sikap positif terhadap siswa berkebutuhan khusus ataupun terhadap pendidikan inklusi seperti yang diharapkan pemerintah.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Mariyana Widiastuti dan Yeny Duriana Wijaya, "Sikap Guru Dan Tenaga Pendidik Terhadap Anak Usia Dini Yang Berkebutuhan Khusus," *MOTORIC: Media Of Teaching Oriental and Children* 4, no. 1 (Juni 2020): 154–62, [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-20255-11\\_1395.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-20255-11_1395.pdf). h. 161

<sup>14</sup> Khusna Yulinda Udhiyanasari, "Sikap Guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi," *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 2, no. 1 (25 Juni 2019): 15–24, <https://doi.org/10.31539/joeai.v2i1.584>. h. 24

<sup>15</sup> Iva Nandya Atika, Norimune Kawai, dan Atsuhiko Funabashi, "Attitudes of Secondary School Science Teachers toward Teaching Diverse Students," *Inklusi Journal of Disability Studies* 8, no. 2 (2021).

<sup>16</sup> Adhissa Qonita, "Menilik Sikap Warga Sekolah Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Di Sekolah Menengah Inklusi Jakarta," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 14, no. 1 (2025).



Pada akhirnya kebijakan pendidikan inklusif bersifat menyeluruh termasuk di wilayah Kota Tangerang. Dengan dilaksanakannya pendidikan inklusif di sekolah negeri khususnya pada SMP di Kota Tangerang yang baru dijalankan selama tiga tahun terakhir. Penerimaan peserta didik baru kedalam lingkungan sekolah yang lebih inklusif ditombaki dari bagaimana sikap guru yang menjadi contoh bagi warga sekolah lainnya. Sikap yang terbentuk dari dimilikinya pengetahuan, bagaimana perasaan hati serta kecenderungan berperilaku para guru terhadap anak berkebutuhan khusus.

Maka dari itu permasalahan terkait sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di wilayah Kota Tangerang menjadi menarik untuk diketahui. Penelitian ini perlu dilakukan karena guru merupakan orang yang bersentuhan langsung dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan mengetahui sikap yang dimiliki guru kelas yang ada di sekolah inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Kota Tangerang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukan guru yang menunjukkan sikap tidak konsisten terhadap peserta didik ABK dengan menunjukkan perhatian hanya saat terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK) berada di kelas.
2. Perlakuan guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam kelasnya yang masih kurang memperhatikan kebutuhan khusus anak sehingga menimbulkan masalah dalam belajar pada siswa berkebutuhan khusus yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara klasikal.
3. Masih ditemukannya sikap guru yang cuek terhadap Anak Berkebutuhan Khusus terhadap keterlibatan dalam pelajaran tertentu.

4. Kesiapan dan sikap guru yang belum merata ditunjukkan dari tidak semua guru bersikap positif terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus.
5. Kurangnya pengetahuan guru tentang ABK dalam praktik mengajar sehingga tidak tercermin dalam sikap maupun tindakan di kelas.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan memuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Sikap guru kelas terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri penyelenggara pendidikan inklusif.
2. Sikap yang diteliti dari penelitian ini berupa kognisi, afeksi dan konasi.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana sikap guru di SMP Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus sudah baik?

### **E. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian yang dilaksanakan ialah untuk mengetahui bagaimana sikap guru di SMP Negeri penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kota Tangerang terkait keberadaan peserta didik ABK ditinjau dari kognisi, afeksi, dan konasi.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait kajian mengenai sikap guru terhadap peserta didik ABK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi laporan masukan bagi pihak sekolah terkait sikap guru terhadap peserta didik ABK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### b. Guru

Hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi guru agar dapat mengimplementasikan pemahaman menjadi sikap positif yang dilakukan terhadap peserta didik ABK.

### c. Mahasiswa Pendidikan Khusus

Hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan studi lanjutan bagi mahasiswa selanjutnya supaya mempelajari sikap guru terhadap peserta didik ABK.

